



LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN

Audited



2019

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di samping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 20 April 2020

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,



Airlangga Hartarto

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ix
RINGKASAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	5
II. NERACA	6
III. LAPORAN OPERASIONAL	7
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
A. PENJELASAN UMUM	9
A.1. DASAR HUKUM	9
A.2. PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	9
A.3. RENCANA STRATEGIS	12
A.4. RINGKASAN HASIL KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	15
A.5. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	19
A.6. DASAR PENGUKURAN	20
A.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI	20
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	31
B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	31
B.2. BELANJA NEGARA	32
B.2.1. BELANJA PEGAWAI	34
B.2.2. BELANJA BARANG	35
B.2.3. BELANJA MODAL	36
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	37
C.1. ASET LANCAR	37
C.1.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	37
C.1.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	37
C.1.3. PIUTANG BUKAN PAJAK	38
C.1.4. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH-PIUTANG BUKAN PAJAK	38

C.1.5. PERSEDIAAN	38
C.2. ASET TETAP	39
C.2.1. PERALATAN DAN MESIN	39
C.2.2. GEDUNG DAN BANGUNAN	41
C.2.3. ASET TETAP LAINNYA	42
C.2.4. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	42
C.3. ASET LAINNYA	43
C.3.1. ASET TAK BERWUJUD	43
C.3.2. ASET LAIN-LAIN	44
C.3.3. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	45
C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	45
C.4.1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	46
C.4.2. UANG MUKA DARI KPPN	46
C.4.3. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	46
C.5. EKUITAS	46
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	47
D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	47
D.2. BEBAN PEGAWAI	48
D.3. BEBAN PERSEDIAAN	48
D.4. BEBAN BARANG DAN JASA	49
D.5. BEBAN PEMELIHARAAN	49
D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS	50
D.7. BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	50
D.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	51
D.9. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	51
D.10. KEGIATAN NON OPERASIONAL	52
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	54
E.1. EKUITAS AWAL	54
E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO	54
E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	54
E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH EKUITAS	54
E.4.1. SELISIH REVALUASI ASET TETAP	54
E.4.2. KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	54
E.4.3. KOREKSI LAIN-LAIN	55

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	55
E.6. EKUITAS AKHIR	55
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	56
F.1. REKENING PEMERINTAH	56
F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN	56
F.2.1. LELANG BARANG MILIK NEGARA	56
F.2.2. REVISI DIPA PAGU ANGGARAN	56
F.2.3. INFORMASI HIBAH LUAR NEGERI	57
F.2.4. PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PENGELOLAAN SISTEM OSS	58
LAMPIRAN PENDUKUNG	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	2
Tabel 3 Capaian Rencana Strategis Tahun 2015-2019	17
Tabel 4 Penggolongan Kualitas Piutang	28
Tabel 5 Masa Manfaat Aset Tetap	29
Tabel 6 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	30
Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019	31
Tabel 8 Perbandingan Rincian Realisasi PNBP 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	31
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2019	33
Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019	33
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	34
Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	35
Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang 30 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	36
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	36
Tabel 15 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	37
Tabel 16 Rincian Persediaan	38
Tabel 17 Rincian Aset Tetap	39
Tabel 18 Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin	40
Tabel 19 Rincian Mutasi Kurang Saldo Peralatan dan Mesin	40
Tabel 20 Rincian Mutasi Tambah Saldo Peralatan dan Mesin	41
Tabel 21 Rincian Mutasi Saldo Gedung dan Bangunan	41
Tabel 22 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019	42
Tabel 23 Rincian Transaksi Aset tak Berwujud Tahun 2019	44
Tabel 24 Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019	45
Tabel 25 Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019	45
Tabel 26 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	46
Tabel 27 Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	47
Tabel 28 Rincian Pendapatan Denda	47
Tabel 29 Rincian Beban Pegawai	48
Tabel 30 Rincian Beban Persediaan	48
Tabel 31 Rincian Beban Barang dan Jasa	49
Tabel 32 Rincian Beban Pemeliharaan	50

Tabel 33 Rincian Beban Perjalanan Dinas	50
Tabel 34 Rincian Penyerahan Barang kepada Pemerintah Daerah	51
Tabel 34 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	51
Tabel 35 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	52
Tabel 36 Rincian Beban Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	52
Tabel 37 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Audit LK 2018 s.d. 31 Desember 2019
Lampiran II	Tindak Lanjut Rekomendasi LHP Atas Laporan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian
Lampiran III	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Lampiran IV	Laporan Pendukung



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 20 April 2020

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Airlangga Hartarto



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT**

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2019 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, April 2020
Inspektur



Mirza Sofjanhadi Mashudi
NIP. 197001181996031001

EXECUTIVE SUMMARY

RINGKASAN

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode Tahun Anggaran 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2019 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp973.148.509,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp427.700.998.822,00 atau sebesar 98,61% dari alokasi anggaran sebesar Rp433.710.862.000,00.

Ringkasan perbandingan Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2019 dan 2018 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1
Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran

No.	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Negara dan Hibah	-	973.148.509		-	1.935.534.996	-
2	Belanja Negara	433.710.862.000	427.700.998.822	98,61%	453.525.156.000	438.909.045.673	96,78%

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per tanggal pelaporan. Nilai Aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp49.739.643.108,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp820.526.839,00, Aset Tetap sebesar Rp44.254.115.525,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp4.665.000.744,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp4.834.675.558,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Adapun jumlah Ekuitas adalah sebesar Rp44.904.967.550,00.

Ringkasan perbandingan Neraca per 31 Desember 2019 dengan Neraca 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-19	31-Dec-18	Rp	%
1	2	3	4	5
Aset				
Aset Lancar	820.526.839	1.720.716.746	(900.189.907)	(52,31%)
Aset Tetap	44.254.115.525	34.228.270.163	10.025.845.362	29,29%
Aset Lainnya	4.665.000.744	8.407.609.757	(3.742.609.013)	(44,51%)
Jumlah Aset	49.739.643.108	44.356.596.666	5.383.046.442	12,14%
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	4.834.675.558	4.325.813.107	508.862.451	11,76%
Ekuitas Dana			0	
Ekuitas	44.904.967.550	40.030.783.559	4.874.183.991	12,18%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	49.739.643.108	44.356.596.666	5.383.046.442	12,14%

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp158.324.460,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp741.577.643.161,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp741.419.318.701,00. Terdapat surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp59.086.705,00. Sedangkan untuk Pos-Pos Luar Biasa bersaldo nihil, sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp741.360.231.996,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp40.030.783.559,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp741.360.231.996,00, ditambah Koreksi yang menambah ekuitas sebesar Rp8.252.179.498,00, dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp737.982.236.489,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp44.904.967.550,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan dalam penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode per tanggal 31 Desember 2019, diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019 DAN 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-19		% thd Angg	TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1		973.148.509	-	1.935.534.996
JUMLAH PENDAPATAN			973.148.509	-	1.935.534.996
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	105.020.531.000	104.020.300.613	99,05%	90.734.621.345
Belanja Barang	B.2.2	318.925.863.000	314.636.547.474	98,66%	339.235.959.903
Belanja Modal	B.2.3	9.764.468.000	9.044.150.735	92,62%	8.938.464.425
JUMLAH BELANJA		433.710.862.000	427.700.998.822	98,61%	438.909.045.673

- Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp427.700.998.822,00 atau sebesar 98,61% dari total pagu anggaran setelah dikurangi pengembalian belanja.
- Sedangkan realisasi belanja pada 31 Desember 2018 adalah Rp438.909.045.673,00, atau sebesar 96,78% dari pagu anggaran Rp453.525.156.000,00.

II. NERACA

NERACA PER 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-19	31-Dec-18
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	149.980.723	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	93.422.527	756.122.835
Piutang Bukan Pajak	C.1.3	138.642.677	184.217.101
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	C.1.4	(693.212)	(921.084)
Persediaan	C.1.5	439.174.124	781.297.894
JUMLAH ASET LANCAR		820.526.839	1.720.716.746
ASET TETAP	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	73.866.781.172	64.652.995.149
Gedung dan Bangunan	C.2.2	29.541.154.075	22.785.169.780
Aset Tetap Lainnya	C.2.3	464.570.712	63.071.925
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.4	(59.618.390.434)	(53.272.966.691)
JUMLAH ASET TETAP		44.254.115.525	34.228.270.163
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tidak Berwujud	C.3.1	15.106.143.042	14.473.017.969
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan		-	-
Aset Lain-Lain	C.3.2	513.326.510	3.380.215.129
Aset Lainnya yang belum diregister		-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(10.954.468.808)	(9.445.623.341)
JUMLAH ASET LAINNYA		4.665.000.744	8.407.609.757
JUMLAH ASET		49.739.643.108	44.356.596.666
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	4.606.249.808	4.232.554.692
Uang Muka dari KPPN	C.4.2	149.980.723	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.3	78.445.027	93.258.415
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		4.834.675.558	4.325.813.107
EKUITAS	C.5		
Ekuitas	C.5	44.904.967.550	40.030.783.559
JUMLAH EKUITAS		44.904.967.550	40.030.783.559
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		49.739.643.108	44.356.596.666

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019 DAN 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-19	31-Dec-18
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan PNBP Lainnya	D.1	158.324.460	22.680
JUMLAH PENDAPATAN		158.324.460	22.680
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	104.413.513.563	90.880.174.121
Beban Persediaan	D.3	4.831.332.513	4.461.440.338
Beban Barang dan Jasa	D.4	491.348.336.815	209.295.032.725
Beban Pemeliharaan	D.5	13.644.270.039	11.781.384.107
Beban Perjalanan Dinas	D.6	111.766.324.555	112.737.616.179
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	4.485.159.717	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	11.088.933.831	9.234.914.089
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	(227.872)	(2.553.696)
Beban Lain-Lain			
JUMLAH BEBAN		741.577.643.161	438.388.007.863
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Operasional		(741.419.318.701)	(438.387.985.183)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9		
Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar		(17.640.202)	16.265.555
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional		59.086.705	757.523.552
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(741.360.231.996)	(437.630.461.631)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa			

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 31 Desember 2019 DAN 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-19	31-Dec-18	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
EKUITAS AWAL	E.1	40.030.783.559	40.648.385.483	(617.601.924)	(1,519)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(741.360.231.996)	(437.630.461.631)	(303.729.770.365)	69,403
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-	-	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	8.252.179.503	(17.371.200)	8.269.550.703	(47.604,948)
Penyesuaian Nilai Aset		-	-	-	
Koreksi Nilai Persediaan		-	-	-	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.1	10.155.373.658		10.155.373.658	100
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4.2	(1.903.194.155)		(1.903.194.155)	100
Koreksi Lain-Lain	E.4.3		(17.371.200)	17.371.200	(100,000)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	737.982.236.489	437.030.230.907	300.952.005.582	68,863
KENAIKAN PENURUAN EKUITAS		4.874.183.991	(617.601.924)	5.491.785.915	(889,211)
EKUITAS AKHIR	E.6	44.904.967.550	40.030.783.559	4.874.183.991	12,176

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

Entitas

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.5/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

A.2. PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Profil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, dan

Industri (EKUIN). Seiring dengan pergantian Pemerintahan, nama Kementerian juga ikut beberapa kali berubah. Nama "Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian" sendiri baru dimulai pada tahun 2000.

Pada tahun 2014 pergantian pemerintahan baru menyebabkan perubahan pada struktur kelembagaan pemerintah pusat. Proses penataan organisasi pun dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyesuaikan rekomendasi restrukturisasi organisasi, berdasarkan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Penetapan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatur peranan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

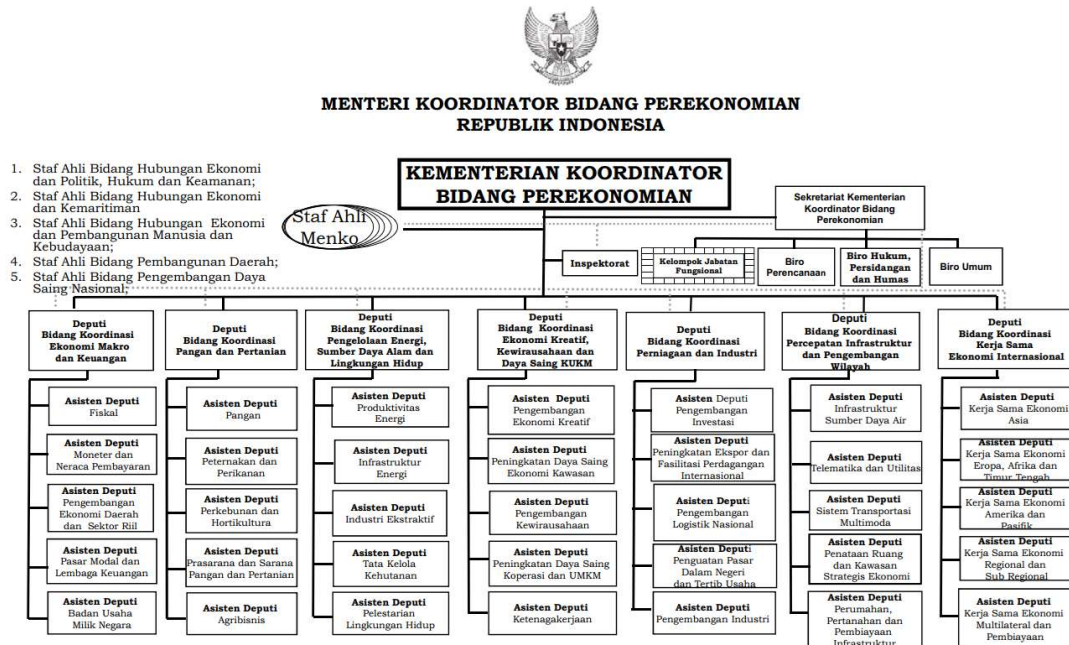
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan Kementerian Keuangan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian

Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Pertanian; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan Instansi lain yang dianggap perlu.

Setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 sesuai hal tersebut di atas, maka diperlukan turunan peraturan dimaksud untuk mengatur kelembagaan internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini terwujud dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditetapkan tanggal 19 Mei 2015. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatur struktur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
- i. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan;
- j. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman;
- k. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- l. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; dan
- m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional.

Struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



A.3. RENCANA STRATEGIS

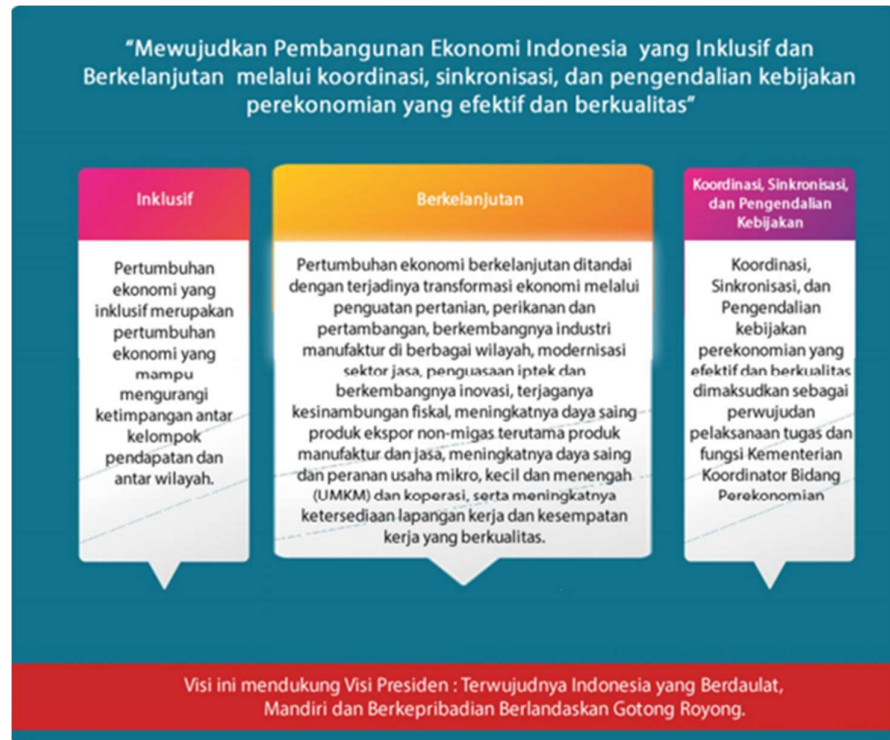
Rencana Strategis

Seiring dengan perkembangan peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam koordinasi perumusan, penetapan, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, telah dilakukan penajaman atas Rencana Strategis Kemenko Perekonomian Tahun 2015 – 2019, yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019. Penajaman atas Renstra dimaksud dilakukan dengan keterlibatan seluruh unit kerja, dengan tujuan utama untuk menyempurnakan kembali rumusan ukuran kinerja yang lebih relevan dengan hasil yang akan dicapai oleh Kemenko Perekonomian.

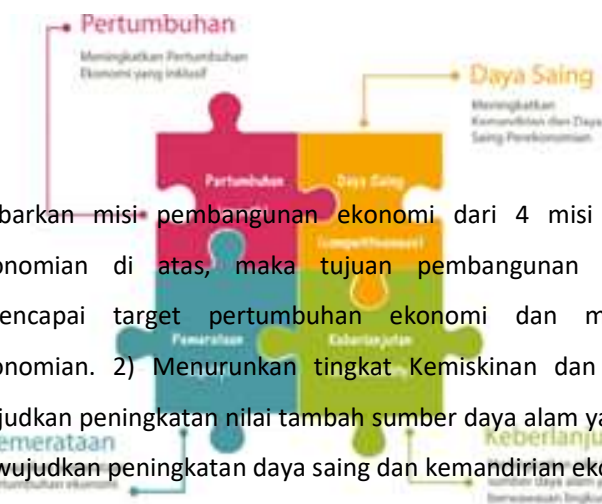
Dalam penajaman atas Renstra Kemenko Perekonomian, seluruh dokumen perencanaan pembangunan nasional, meliputi RPJP 2005-2025, Ideologis Bangsa, Nawacita, dan Misi Presiden, dijadikan rujukan dalam penetapan visi,

misi, tujuan, dan sasaran strategis dalam dokumen penajaman Renstra Tahun 2015-2019 Kemenko Perekonomian.

Visi Kemenko Perekonomian ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional di bidang pembangunan ekonomi. Visi Kemenko Perekonomian adalah:



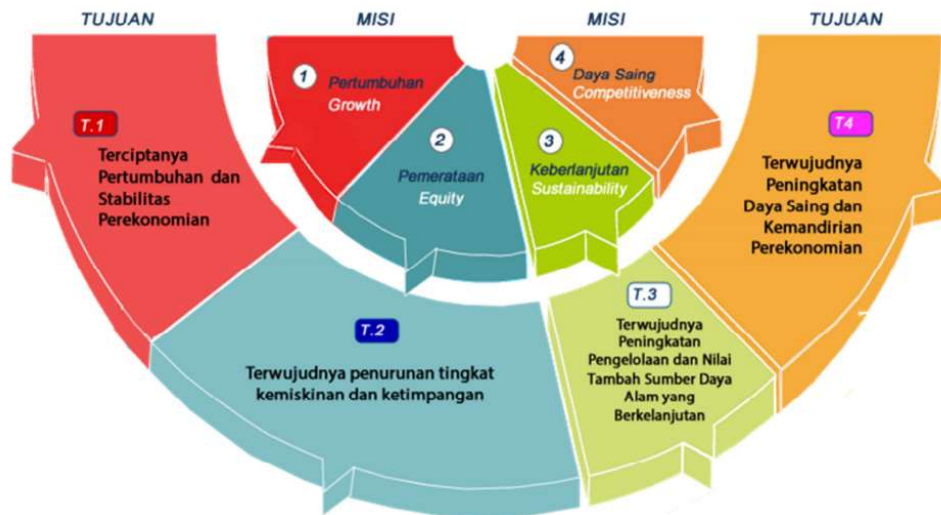
Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundangan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat empat (4) pilar yang menjadi misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu:



Menjabarkan misi pembangunan ekonomi dari 4 misi utama Kemenko Perekonomian di atas, maka tujuan pembangunan ekonomi adalah:

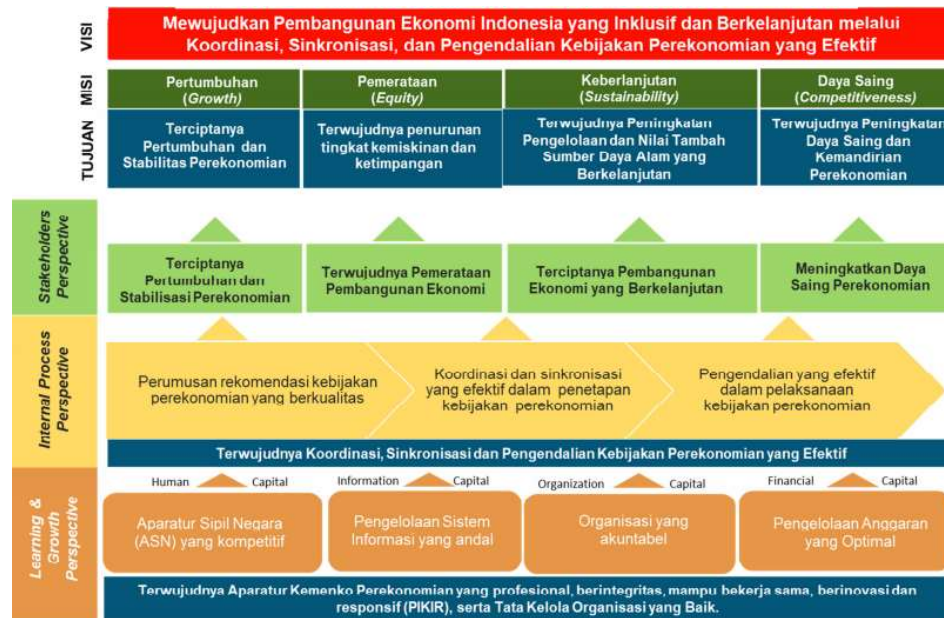
- 1) Mencapai target pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian.
- 2) Menurunkan tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan.
- 3) Mewujudkan peningkatan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan peningkatan daya saing dan kemandirian ekonomi.

- 1) Pertumbuhan (growth), yakni meningkatkan pertumbuhan dan menciptakan stabilitas perekonomian;
- 2) Pemerataan (equity), yakni memastikan pemerataan hasilhasil pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat;
- 3) Keberlanjutan (sustainability), yakni meningkatkan nilai tambah dan manfaat ekonomi dari sumber daya alam, dengan senantiasa memperhatikan pelestarian lingkungan hidup;
- 4) Daya Saing (competitiveness), yakni meningkatkan daya saing dan kemandirian perekonomian nasional.



Pada dokumen penajaman Renstra Kemenko Perekonomian Tahun 2015-2019, sasaran strategis pembangunan ekonomi merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai suatu outcome/impact dari program teknis berupa Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian, serta kegiatan-kegiatan koordinasi yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kemenko Perekonomian menjabarkan 4 misi yakni Pertumbuhan, Pemerataan, Keberlanjutan, dan Daya Saing, serta menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspective, yakni stakeholders perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, sebagai berikut:

PETA STRATEGI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN



Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditetapkan akan dicapai dalam kurun periode 2015-2019. Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan tersebut akan diukur dengan indikator dan sasaran strategis.

A.4. RINGKASAN HASIL KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

a. Target Kinerja Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Tahun 2019 merupakan tahun akhir dari periode Lima tahun pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Target Kinerja Rencana Strategis Tahun 2015-2019 tersaji dalam tabel sebagai berikut

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja Tahunan				
		2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran Strategis 1 (SS-1): Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	1) Persentase kebijakan baru bidang perekonomian yang terimplementasi	100	100	100	100	100
Sasaran Strategis 2 (SS-2): Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Perekonomian	2) Persentase revisi kebijakan Bidang Perekonomian yang terimplementasi	100	100	100	100	100
Sasaran Strategis 3 (SS-3): Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	3) Tingkat kinerja Manajemen Kementerian	4	4	4	4	4

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019

Seiring dengan dinamika perkembangan organisasi, terhitung sejak tahun 2018, dilakukan perubahan atas target kinerja dan metode pengukuran kinerja, sebagai berikut:

- Terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis, yaitu “Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian” dan “Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Perekonomian”, yang ditiadakan untuk Penetapan Kinerja pada tahun 2018 dan 2019.
- Peniadaan 2 (dua) Sasaran Strategis dari Renstra Tahun 2015-2019 kemudian digantikan dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis baru di tahun 2018 dan 2019, yaitu:
 1. Peningkatan Akses Pembiayaan bagi UMKM;
 2. Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan; dan
 3. Perbaikan Iklim Investasi dan Peningkatan Daya Saing.
- Terdapat penambahan jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) seiring dengan perubahan Sasaran Strategis. Pada Tahun 2015-2017 terdapat hanya 3 (tiga) IKU, adapun pada tahun 2018-2019 terdapat 9 (sembilan) IKU. Untuk IKU terkait Kebijakan Satu Peta, terdapat perubahan dari tahun 2018, yang semula berupa “Perbaikan Peta Dasar (IGD) di Papua, Maluku, Jawa”, berubah menjadi “Sinkronisasi Peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi” di tahun 2019.
- Terdapat perbedaan metode pengukuran kinerja untuk IKU berupa “Tingkat Kinerja Manajemen Kementerian”, yang digunakan pada tahun 2015-2017 dan pada 2018-2019. Pada tahun 2015-2017, perhitungan dalam pengukuran IKU ini bersumber dari jumlah peraturan/ keputusan Menteri Teknis dalam rangka deregulasi kebijakan perekonomian. Pada tahun 2018 dan 2019 dilakukan perubahan metode pengukuran IKU “Tingkat Kinerja Manajemen Kementerian”, menjadi perhitungan indeks capaian, dengan berdasarkan pada 4 (empat) hasil evaluasi tata kelola, yaitu di bidang keuangan, sistem manajemen kinerja, reformasi birokrasi, dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Perubahan atas target kinerja dan metode pengukuran kinerja tersebut didasarkan pada dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang menjadi dasar penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja, dan dilaporkan pada dokumen LAKIP.

b. Capaian Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Ringkasan capaian atas Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019, serta perubahan-perubahannya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Capaian Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis (SS) dan IKU	Target (T) dan Realisasi Kinerja (R)									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
SS. Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian										
1) Persentase kebijakan baru bidang perekonomian yang terimplementasi	100	106	100	118	100	100	n.a.*		n.a.	
SS. Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Perekonomian										
2) Persentase kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi	100	211	100	138	100	94,7	n.a.		n.a.	
SS. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik**										
3) Tingkat Kinerja Manajemen Kementerian	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3
SS. Peningkatan Akses Pembiayaan bagi UMKM										
4) Target Penyaluran KUR (Triliun)	n.a.		n.a.		n.a.		123,8	120,4	140	140,08
5) Indeks Keuangan Inklusif	n.a.		n.a.		n.a.		68%	70%	75	76,19
SS. Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan										
6) Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan di Bidang Stabilitas Harga Pangan	n.a.		n.a.		n.a.		1	1	1	1
SS. Perbaikan Iklim Investasi dan Peningkatan Daya Saing										
7) Peringkat Kemudahan Berusaha (EoDB)	n.a.		n.a.		n.a.		<72	73	<73	73
8) Perbaikan Peta Dasar (IGD) di Papua, Maluku, Jawa	n.a.		n.a.		n.a.		3	3		n.a.
9) Sinkronisasi Peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		1	1
10) Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	n.a.		n.a.		n.a.		5	5	1	1
11) Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Pengembangan e-commerce	n.a.		n.a.		n.a.		1	1	1	1
12) Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi	n.a.		n.a.		n.a.		4	4	1	1
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2015-2019	132,67		115,67		97,63		95,65		95,88	

n.a. (not available) / tidak ditetapkan

Dikarenakan adanya perubahan target kinerja dan perbedaan metode pengukuran kinerja pada sejumlah IKU, terlihat bahwa terdapat tren penurunan Nilai Kinerja Organisasi pada tahun 2015-2018, meskipun mengalami sedikit peningkatan di tahun 2019. Namun, jika dilakukan pengukuran rata-rata nilai capaian kinerja Kementerian Koordinator Perekonomian selama tahun 2015-2019 dihasilkan angka capaian kinerja sebesar 107,5%. Secara umum, hal tersebut menunjukkan bahwa, sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Tahun 2015-2019, beserta perubahan-perubahannya,

telah dapat dicapai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pencapaian atas target indikator kinerja tersebut terlihat pula dari sejumlah dampak kinerja di bidang perekonomian. Pencapaian atas target indikator kinerja tersebut terlihat pula dari sejumlah dampak kinerja di bidang perekonomian sebagai berikut:

- Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh di kisaran 5 persen. Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2019 mencapai 5,02%.
- Inflasi tahun 2019 sebesar 2,72%, menjadi angka inflasi yang terendah dalam satu periode pemerintahan sejak era reformasi.
- Angka kemiskinan mencapai level satu digit, yaitu 9,22%, dibarengi dengan angka ketimpangan pendapatan (Gini rasio) yang terus menurun di level 0,38).
- Selain itu, penciptaan lapangan kerja telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran pada tingkatan 5,28% dari sebelumnya sebesar 5,34% (2018), dan 5,5% (2017).

A.5. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk tingkat pelaporan Eselon I, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Untuk periode pelaporan di tahun anggaran 2019, satuan kerja yang dicakup dalam Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi dua satuan kerja, yaitu Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) dan Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755), yang keduanya dikonsolidasikan dalam satu unit pelaporan tingkat Eselon I pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Dalam penyusunan laporan keuangan digunakan basis akuntansi akrual untuk Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, adapun untuk Laporan Realisasi Anggaran menggunakan akuntansi berbasis kas.

A.6. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan KUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila

diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan public yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Aset Tetap

- (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang berkorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data

pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan untuk penyempurnaan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai aset tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *Unaudited* sesuai mekanisme yang berlaku.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

c. Piutang Jangka Panjang

*Piutang Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud

merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang dibatasi penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundangundangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga

dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 4
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5 %
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10 %
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50 %
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100 %

(9) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada PMK Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2013 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013, sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Masa

manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya	4 tahun

(10) Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi barang milik negara berupa Aset Tak Berwujud adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Kebijakan amortisasi Aset Tak Berwujud didasarkan pada PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan terhadap Perangkat Lunak (*software*) komputer, Lisensi, Waralaba (*franchise*), Hak Cipta (*copyright*), dan Hak Paten.

Amortisasi tidak dilakukan terhadap:

- Aset tak berwujud dalam kondisi usang/atau rusak berat, serta telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya; dan
- Aset tak berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah serta telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang, untuk dilakukan penghapusannya.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KMK.06/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, <i>Merk</i> , Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah
Rp973.148.509*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp973.148.509,00, tidak terdapat estimasi pendapatan yang ditetapkan pada anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2019. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Rincian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 7
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan dan Pengelolaan BMN	-	11.505.555	-
2	Pendapatan dan Penerimaan Kembali Tahun Anggaran yang Lalu	-	801.794.244	-
3	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		158.324.460	
4	Pendapatan Setoran Sisa Utang Pensiunan PNS	-	1.524.250	
Jumlah		-	973.148.509	-

Realisasi PNBP pada Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar Rp962.386.487,00 atau turun sebesar 49,72% dibandingkan realisasi PNBP pada 31 Desember tahun 2018. Perbandingan realisasi PNBP disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8
**Perbandingan Rincian Realisasi PNBP
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018**

No	Uraian	31-Dec	31-Dec	Kenaikan (Penurunan)	
		TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	11.505.555	16.265.555	(4.760.000)	(29,26%)
2	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	-	22.680	(22.680)	(100%)
3	Pendapatan Denda	158.324.460	-	158.324.460	100%
4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	9.750.000	133.663.219	(123.913.219)	(92,71%)
5	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	792.044.244	1.775.735.342	(983.691.098)	(55,40%)
6	Pendapatan Setoran Sisa Utang Pensiunan PNS	1524.250	9.848.200	(8.323.950)	(84,52%)
Jumlah		973.148.509	1.935.534.996	(962.386.487)	(49,72%)

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut

- a. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN merupakan penerimaan atas penjualan 1 paket barang persediaan yang telah usang/*expired* sesuai risalah lelang Nomor 309/20/2019 tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp5.155.555,00 dan 1 paket barang inventaris kantor sesuai risalah lelang Nomor 780/25/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp6.350.000,00.
- b. Pendapatan denda berasal dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan jasa konsultan (BAST) dengan rincian sebagai berikut:
 - Denda pekerjaan pengadaan unit computer/pc sebesar Rp1.178.100,00;
 - Denda pekerjaan jasa peliputan dan penayangan media online nasional KEIN sebesar Rp113.025,00;
 - Denda pekerjaan jasa peliputan dan penayangan media online nasional FGD ekonomi pancasila pembangunan koperasi dan wilayah pedesaan sebesar Rp124.575,00;
 - Denda keterlambatan jasa pengembangan aplikasi OSS sebesar Rp104.981.305,00;
 - Denda pekerjaan jasa konsultasi Tenaga Ahli Senior Finansial KPPIP sebesar Rp280.000,00;
 - Denda pekerjaan jasa konsultasi Tenaga Ahli Legal KPPIP sebesar Rp48.000,00;
 - Denda pekerjaan jasa konsultasi Tenaga Ahli Senior Transportasi KPPIP sebesar Rp128.000,00;
 - Denda pekerjaan jasa konsultasi Tenaga Ahli Senior SDA KPPIP sebesar Rp187.200,00;
 - Denda pekerjaan belanja sewa sebesar Rp51.284.255,00.
- c. Penerimaan kembali belanja barang TAYL terdiri atas temuan APIP, honor tim, jasa konsultan, perjadi LN, konsinyering luar kota sebesar Rp792.044.244,00
- d. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL atas pengembalian kelebihan tunjangan kinerja pegawai tahun 2018 sebesar Rp9.750.000,00
- e. Pendapatan setoran dari sisa utang pensiunan PNS sebesar Rp1.524.250,00

B.2.BELANJA NEGARA

*Realisasi Belanja
Negara
Rp427.700.998.822*

Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp427.700.998.822,00 atau mencapai 98,61%

dari alokasi anggaran sebesar Rp433.710.862.000,00. Realisasi belanja tersebut seluruhnya merupakan realisasi belanja dari transaksi kas, setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp653.886.791,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2019 berdasarkan program dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2019

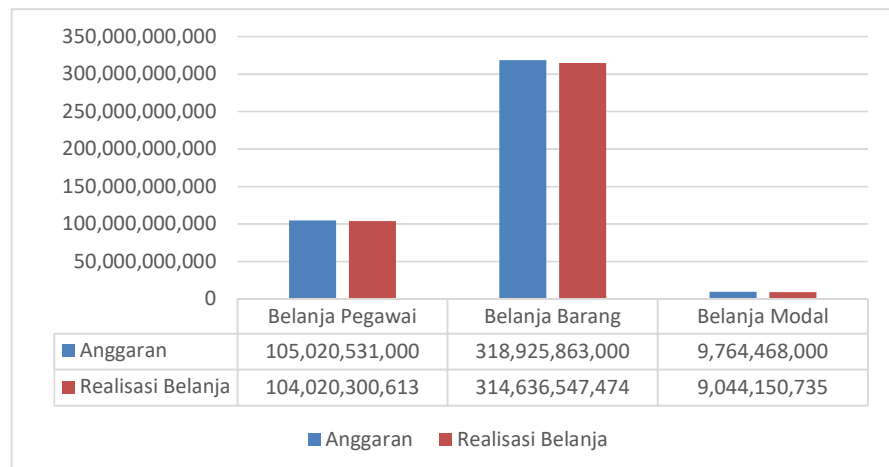
Kode Program	Uraian Program	Anggaran	Realisasi Belanja Netto	(%)	Pengembalian Belanja
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian	186.917.037.000	185.504.606.702	99,24%	66.290.734
6	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	246.793.825.000	242.196.392.120	98,14%	587.596.057
Jumlah		433.710.862.000	427.700.998.822	98,61%	653.886.791

Realisasi belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2019, seluruhnya bersumber dari dana Rupiah Murni sebesar Rp427.700.998.822,00. Berdasarkan jenis belanja, rincian anggaran dan persentase realisasi terhadap anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019

Kode	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	%
51	Belanja Pegawai	105.020.531.000	104.020.300.613	1.000.230.387	99,05%
52	Belanja Barang	318.925.863.000	314.636.547.474	4.289.315.526	98,66%
53	Belanja Modal	9.764.468.000	9.044.150.735	720.317.265	92,62%
Jumlah Belanja		433.710.862.000	427.700.998.822	6.009.863.178	98,61%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja periode Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Persentase realisasi atas jenis belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun Anggaran 2019 paling tinggi adalah belanja Pegawai yakni 99,05% atau sebesar Rp104.020.300.163,00 dari pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp105.020.531.000,00. Adapun untuk belanja barang terealisasi senilai 98,66% atau sebesar Rp314.636.547.474,00, sedangkan belanja modal sampai dengan 31 Desember 2019 telah terealisasi 92,62% atau sebesar Rp9.044.150.735,00.

Perbandingan realisasi belanja pada periode Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)	
		31-Dec TA 2019	31-Dec TA 2018
51	Belanja Pegawai	104.020.300.613	90.734.621.345
52	Belanja Barang	314.636.547.474	339.235.959.903
52	Belanja Modal	9.044.150.735	8.938.464.425
Jumlah		427.700.998.822	438.909.045.673

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai
Rp104.020.300.61
3

Pada periode anggaran sampai dengan 31 Desember 2019, pagu Belanja Pegawai telah terealisasi sebesar 99,05% atau sebesar Rp104.020.300.613,00 dari pagu sebesar Rp105.020.531.000,00. Nominal pagu dan realisasi terbesar pada Belanja Pegawai adalah kelompok belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito yang digunakan untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai, yang terealisasi sebesar 99,99% dari total pagu kelompok belanja dimaksud.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan 2018, dengan capaian masing-masing sebesar Rp104.020.300.613,00 dan Rp90.734.621.345,00 atau naik sebesar 14,64%. Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan dikarenakan adanya penambahan jumlah pegawai. Adapun Pengembalian Belanja Pegawai pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp35.747.774,00 dan Rp35.214.283,00. Rincian Belanja Pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12
Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Kelompok Belanja	Uraian	31-Dec-19			Realisasi 31 Des	Perbandingan Realisasi	
		Pagu	Realisasi	%	Tahun 2018	Naik (turun)	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	34.952.517.000	34.259.357.108	98,02%	26.840.839.775	7.418.517.333	27,64%
5115	Belanja Gaji dan Tunj Pegawai Non PNS	192.500.000	105.000.000	54,55%	157.500.000	(35.000.000)	
5122	Belanja Lembur	385.901.000	204.235.000	52,92%	211.661.988	(742.988)	(3,51%)
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	69.489.613.000	69.487.456.279	99,99%	63.559.833.865	5.927.622.414	9,33%
Pengembalian Belanja Pegawai			(35.747.774)	-	(35.214.283)	(533.491)	1,51%
Jumlah Kelompok Belanja Pegawai		105.020.531.000	104.020.300.613	99,05%	90.734.621.345	13.285.679.268	14,64%

B.2.2. BELANJA BARANG

*Realisasi Belanja
Barang
Rp314.636.547.474*

Pada periode Tahun 2019, pagu Belanja Barang telah terealisasi sebesar 98,66% atau sebesar Rp314.636.547.474,00 dari pagu sebesar Rp318.925.863.000,00.

Persentase realisasi terbesar pada Belanja Barang terdapat pada kelompok akun Belanja Barang Operasional sebesar Rp9.829.280.591,00 atau 99,67% dari total pagu kelompok akun Belanja Barang Operasional sebesar Rp9.862.206.000. Persentase realisasi terbesar kedua Belanja Barang merupakan kelompok akun Belanja Pemeliharaan yang terealisasi sebesar 99,64% atau sebesar Rp13.220.057.315,00 dari pagu sebesar Rp13.268.463.000,00.

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2019 jika dibandingkan 31 Desember 2018, dengan capaian realisasi masing-masing adalah sebesar Rp314.636.547.474,00 dan Rp339.235.959.903,00. Perbandingan persentase kenaikan realisasi yang paling besar terdapat pada belanja pemeliharaan yakni 16,94% atau sebesar Rp1.915.355.356,00.

Adapun Pengembalian Belanja Barang pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp618.139.017,00 dan Rp346.395.743,00. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 13
Perbandingan Belanja Barang 30 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Kelompok Belanja	Uraian	31-Dec-19			Realisasi 31 Desember 2018	Perbandingan Realisasi	
		Pagu	Realisasi	%		Naik (turun)	%
5211	Belanja Barang Operasional	9.862.206.000	9.829.280.591	99,67%	9.708.666.828	20.613.763	124%
5212	Belanja Barang Non Operasional	43.824.155.000	43.334.054.019	98,88%	42.194.864.017	1.139.190.002	2,70%
5213	Belanja Barang Persediaan	4.893.977.000	4.858.931.525	99,28%	5.005.597.856	(146.666.331)	(2,93%)
5221	Belanja Jasa	133.029.795.000	131.654.615.804	98,97%	158.190.464.708	(26.535.848.904)	(16,77%)
5231	Belanja Pemeliharaan	13.268.463.000	13.220.057.315	99,64%	11.304.701.959	1915.355.356	16,94%
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	97.582.638.000	96.278.083.814	98,66%	91.245.080.294	5.033.003.520	5,52%
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	16.464.629.000	16.079.663.423	97,66%	21.932.979.984	(5.853.316.561)	(26,69%)
Pengembalian Belanja			(618.139.017)		(346.395.743)	(271.743.274)	78,45%
Jumlah Kelompok		318.925.863.000	314.636.547.474	98,66%	339.235.959.903	(24.599.412.429)	(7,25%)

B.2.3. BELANJA MODAL

*Realisasi Belanja Modal
Rp9.044.150.735*

Pada periode tahun 2019, pagu Belanja Modal telah terealisasi sebesar 92,62% atau sebesar Rp9.044.150.735,00 dari pagu sebesar Rp9.977.468.000,00. Nominal pagu terbesar pada Belanja Modal terdapat pada kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.772.842.000,00, kemudian diikuti Belanja Modal Lainnya sebesar Rp1.991.626.000.000,00 atau 25,62% yang digunakan untuk perolehan Aset Tak Berwujud dalam bentuk perangkat lunak komputer (*software*) dan lisensi dan belanja penambahan nilai Aset Tetap Lainnya. Capaian nominal terbesar realisasi Belanja Modal terdapat pada kelompok Belanja Peralatan Mesin, yang terealisasi sebesar Rp7.134.500.735,00 atau 91,79%.

Perbandingan realisasi belanja modal pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018, masing-masing sebesar Rp9.044.150.735,00 dan Rp8.938.464.425,00. Rincian belanja modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Kelompok Belanja	Uraian	31-Dec-19	Realisasi	%	Realisasi 31 Desember Tahun 2018	Perbandingan Realisasi	
		Pagu				Naik (turun)	%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.772.842.000	7.134.500.735	91,79%	5.515.552.911	1.618.947.824	29,35%
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-				
5361	Belanja Modal Lainnya	1.991.626.000	1.909.650.000	95,88%	3.422.911.514	(1.513.261.514)	(44,21%)
Pengembalian Belanja Modal		-	-				
Jumlah Belanja Modal		9.764.468.000	9.044.150.735	92,62%	8.938.464.425	105.686.310	1,18%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1.ASET LANCAR

Aset Lancar
Rp820.526.839

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp820.526.839,00 dan Rp1.720.716.746,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Aset Lancar	Tahun 2019	TA 2018
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	149.980.723	
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	93.422.527	756.122.835
3	Piutang Bukan Pajak	138.642.677	184.217.101
4	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(693.212)	(921.084)
5	Persediaan	439.174.124	781.297.894
6	Persediaan Belum Diregister		
Jumlah		820.526.839	1.720.716.746

C.1.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp149.980.723

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 bersaldo sebesar Rp149.980.723,00, adapun saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) per 31 Desember 2019 yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

C.1.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp93.422.527

Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 bersaldo Rp93.422.527,00 dan Rp756.122.835,00. Kas lainnya setara kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, antara lain penerimaan uang pengembalian belanja dan penerimaan uang potongan pajak yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

C.1.3. PIUTANG BUKAN PAJAK

*Piutang Bukan
Pajak
Rp138.642.677*

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp138.642.677,00 dan Rp184.217.101,00 yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 merupakan piutang yang terdiri dari piutang PPNN, piutang Jasa konsultan dan piutang atas TGR Non bendahara.

C.1.4. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH-PIUTANG BUKAN PAJAK

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Piutang
Bukan Pajak
(Rp693.212)*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar (Rp693.212,00) dan (Rp921.084,00). Nilai tersebut merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2019 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian digolongkan dalam piutang dengan kualitas lancar. Dengan demikian perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek sesuai dengan yang diatur di PMK Nomor 69/PMK/06/2014 menggunakan nilai penyisihan sebesar 0,5%.

C.1.5. PERSEDIAAN

*Persediaan
Rp439.174.124*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp439.174.124,00 dan Rp781.297.894,00. Persediaan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut

Tabel 16
Rincian Persediaan

No	Uraian	31-Dec-19	31 Des 18
1	Barang Konsumsi	353.962.160	654.333.395
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	70.584.190	114.942.900
3	Persediaan Lainnya	14.627.774	12.021.599
Jumlah		439.174.124	781.297.894

Saldo persediaan per 31 Desember 2019 berdasarkan harga pembelian terakhir.

C.2.ASET TETAP

Aset Tetap
Rp44.254.115.525

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp44.254.115.525,00 dan Rp34.228.270.163,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Aset Tetap

No	Uraian	31-Dec-19	31 Des 18
1	Peralatan dan Mesin	73.866.781.172	64.652.995.149
2	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	-	-
3	Gedung dan Bangunan	29.541.154.075	22.785.169.780
4	Aset Tetap Lainnya	464.570.712	63.071.925
Total Nilai Perolehan		103.872.505.959	87.501.236.854
Akumulasi Penyusutan		(59.618.390.434)	(53.272.966.691)
Jumlah		44.254.115.525	34.228.270.163

C.2.1. PERALATAN DAN MESIN

*Peralatan dan
Mesin*
Rp73.866.781.172

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp73.866.781.172,00 dan Rp64.652.995.149,00. Penambahan nilai Peralatan dan Mesin terdiri atas realisasi belanja dalam rangka perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp7.134.500.735,00. Terdapat mutasi tambah peralatan dan mesin berupa transfer masuk server sebesar Rp2.264.125.572,00 yang berasal dari Badan Informasi Geospasial dan hibah masuk yang berasal dari proyek JUTPI Phase sebesar Rp39.750.000,00. Kemudian terdapat mutasi kurang peralatan dan mesin berupa penghentian aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp224.590.284,00. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp57.838.802.839,00 sehingga nilai buku peralatan dan mesin adalah sebesar Rp16.027.978.333,00. Rincian mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin

Uraian Transaksi	Saldo	
Nilai Perolehan per 31 Desember 2018		64.652.995.149
Mutasi Tambah		
Realisasi Belanja	7.134.500.735	
Tranfer Masuk	2.264.125.572	
Hibah Masuk	39.750.000	
Total Mutasi Tambah	9.438.376.307	
Mutasi Kurang		
Pembayaran Hutang Modal TAYL	-	
Beban Aset Ekstrakomptabel		
Aset tetap yang tidak digunakan	224.590.284	
Total Mutasi Kurang	224.590.284	
Nilai Perolehan per 31 Desember 2019		73.866.781.172
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2019		57.838.802.839
Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019		16.027.978.333

Transaksi penambahan dan pengurangan pada Peralatan dan Mesin terdiri dari:

Tabel 19
Rincian Mutasi Kurang Saldo Peralatan dan Mesin

No	Kode Barang	Jumlah Unit	Rupiah Aset
305	Alat Kantor & Rumah Tangga	11	51.281.332
306	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5	34.518.000
308	Alat Laboratorium		
310	Alat Komputer	13	138.790.952
Total		29	224.590.284

Tabel 20
Rincian Mutasi Tambah Saldo Peralatan dan Mesin

Kelompok BMN	Mutasi Peralatan dan Mesin	Kuantitas	Nilai
A. Saldo Transaksi Pembelian dan Transfer Masuk			
301	Alat Besar		
302	Alat Angkutan		
303	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2	10.670.000
305	Alat Kantor & Rumah Tangga	335	2.072.645.020
306	Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	57	200.221.500
307	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2	5.320.265
308	Alat Laboratorium		-
309	Alat Khusus Kepolisian		-
310	Komputer	269	7.149.519.522
319	Alat Olahraga		
Total Saldo Pembelian dan Transfer Masuk		665	9.438.376.307
B. Transaksi Pengembangan Nilai Aset			
301	Alat Besar		-
310	Komputer		-
	Total Transaksi Pengembangan Nilai Aset		-
C. Transaksi Pengembangan Melalui KDP			
301	Alat Besar		-
310	Komputer		-
	Total Transaksi Pengembangan Nilai Aset		-
Mutasi Peralatan dan Mesin s.d 30 September 2019		665	9.438.376.307

C.2.2. GEDUNG DAN BANGUNAN

*Gedung dan
Bangunan
Rp29.541.154.075*

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp29.541.154.075,00 dan Rp22.785.169.780,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21
Rincian Mutasi Saldo Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai
Saldo Per Desember 2018	22.785.169.780
Mutasi Tambah	
Revaluasi Aset	10.113.676.653
Koreksi atas LHIP Revaluasi	41.697.000
Koreksi Pencatatan atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.399.389.358)
Saldo Per 31 Desember 2019	29.541.154.075
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(1.779.587.595)
Nilai Buku 31 Desember 2019	27.761.566.480

Terdapat Revaluasi Gedung dan Bangunan yang sebelumnya dikeluarkan dari Laporan Keuangan Tahun 2018, di tahun 2019 dilakukan *take in* revaluasi sebesar Rp10.155.373.653,00. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan Rp27.761.566.480,00, yaitu sebesar nilai perolehan gedung dan bangunan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp1.779.587.595,00.

C.2.3. ASET TETAP LAINNYA

*Aset Tetap
lainnya
Rp464.570.712*

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp464.570.712,00 dan Rp63.071.925,00. Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara fisik berupa koleksi Buku Perpustakaan dan Bahan Kartografi senilai Rp63.071.925,00 dan data gambar satelit atas program hibah JUTPI *Phase II* senilai Rp401.498.787,00.

C.2.4. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp59.618.390.434*

Saldo yang dilaporkan dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp59.618.390.434,00 dan Rp53.272.966.691,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 22
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	73.866.781.172	57.838.802.839	16.027.978.333
2	Peralatan dan Mesin Belum Diregister		-	
3	Gedung dan Bangunan	29.541.154.075	1.779.587.595	27.761.566.480
4	Aset Tetap Lainnya	464.570.712	0	464.570.712
Jumlah		103.872.505.959	59.618.390.434	44.254.115.525

C.3.ASET LAINNYA

*Aset Lainnya Rp.
4.665.000.744*

Saldo Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.665.000.744,00 dan Rp8.407.609.757,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Penurunan saldo aset lainnya di tahun 2019 tersebut diantaranya dikarenakan adanya persetujuan penjualan BMN melalui surat nomor S-636/SES.M.EKOM/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 berupa peralatan dan mesin senilai Rp2.594.152.592,00 dan nomor BM.3.11-726.1/SES.M.EKON/11/2019 senilai Rp421.298.711,00. Adanya penurunan saldo aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah juga didasarkan atas persetujuan penghapusan barang milik negara nomor BM.3.11-677/SES.M.EKON/11/2019 tanggal 13 November 2019 berupa software senilai Rp76.027.600,00

C.3.1. ASET TAK BERWUJUD

*Aset Tak Berwujud
Rp15.106.143.042*

Saldo nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp15.106.143.042,00 dan Rp14.473.017.969,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupa *software* dan lisensi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Sedangkan pengurangan software terjadi pada Tahun 2019 yaitu atas aplikasi Pelayanan Perizinan Online Single Submission (OSS) yang sudah dilakukan Transfer Keluar ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan harga perolehan senilai Rp4.243.745.264,00. Adapun rincian mutasi Aset Tak Berwujud sampai dengan tanggal 31 Desember 2109 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Transaksi Aset tak Berwujud Tahun 2019

Jenis Transaksi Aset Tak Berwujud	Nilai
Saldo Awal	14.473.017.969
- <i>Software</i>	12.219.830.469
- Lisensi	2.253.187.500
Mutasi Tambah	
- Pembelian <i>Software</i> Komputer	1.909.650.000
- Hibah Masuk <i>Software</i>	2.967.220.337
- Koreksi Antar Beban	
- Pembelian Lisensi	
- Pengembangan Nilai Aset <i>Software</i>	
- Pengembangan Melalui KDP <i>Software</i>	
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	
- <i>Software</i> Komputer	4.243.745.264
Saldo ATB Per 31 Desember 2019	15.106.143.042
- <i>Software</i>	12.852.955.542
- Lisensi	2.253.187.500

C.3.2. ASET LAIN-LAIN

Aset Lain-lain
Rp513.326.510

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp513.326.510,00 dan Rp3.380.215.129,00. Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) terdiri atas aset tetap dan aset tak berwujud yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas, atau dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Terkait dengan penurunan nilai aset tetap yang tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintah didasarkan atas surat persetujuan penjualan BMN nomor S-636/SES.M.EKOM/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 berupa peralatan dan mesin senilai Rp2.594.152.592,00 dan nomor BM.3.11-726.1/SES.M.EKON/11/2019 senilai Rp421.298.711,00. Penurunan saldo aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah didasarkan atas persetujuan penghapusan barang milik negara nomor BM.3.11-677/SES.M.EKON/11/2019 tanggal 13 November 2019 berupa software senilai Rp76.027.600,00. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, terdiri atas:

Tabel 24
Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	155.163.260	2.946.024.279
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	358.163.250	434.190.850
Jumlah		513.326.510	3.380.215.129

C.3.3. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Lain-lain
Rp10.954.468.808*

Saldo yang dilaporkan dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar minus Rp10.954.468.808,00 dan minus Rp9.445.623.341,00.

Tabel 25
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	12.852.955.542	9.657.357.485	3.195.598.057
2	Lisensi	2.253.187.500	799.134.375	1.454.053.125
Jumlah A. Aset Tak Berwujud		15.106.143.042	10.456.491.860	4.649.651.182
B	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan			
1	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan			
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan				
C	Aset Lainnya			
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	155.163.260	155.163.260	0
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	358.163.250	342.813.688	15.349.562
Jumlah B. Aset Lainnya		513.326.510	497.976.948	15.349.562
D	Aset Lainnya Yang Belum Diregister			
1	Aset Lainnya Yang Belum Diregister			
Aset Lainnya Yang Belum Diregister				
Total		15.619.469.552	10.954.468.808	4.665.000.744

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

*Kewajiban Jangka
Pendek
Rp4.834.675.558*

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.834.675.558,00 dan Rp4.325.813.107,00 yang merupakan kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Mutasi saldo kewajiban jangka pendek diantaranya terdapat sisa UP/TUP sebesar Rp149.980.723,00 dan

utang pajak yang belum disetor pada tanggal pelaporan sebesar Rp78.445.027,00 dan saldo utang kepada pihak ketiga (berupa utang gaji pegawai dan utang langganan daya jasa) sebesar Rp.4.606.249.808,00.

C.4.1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

*Utang Kepada
Pihak ketiga
Rp4.606.249.808*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp4.606.249.808,00 dan Rp4.232.554.692,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tabel 26
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

Uraian Akun	Saldo	Keterangan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	4.565.767.221	Utang Gaji dan Tunjangan Kinerja
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	40.482.587	Utang Listrik dan Telepon
Total	4.606.249.808	-

C.4.2. UANG MUKA DARI KPPN

*Uang Muka Kppn
Rp149.980.723*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp149.980.723,00 dan Rp0. Uang Muka KPPN merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.4.3. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp78.445.027*

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 bersaldo Rp78.445.027,00 sedangkan per 31 Desember 2018 bersaldo Rp93.258.415,00. Utang Jangka Pendek Lainnya pada tahun 2019 merupakan saldo kas yang berasal dari pungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo pungutan pajak sebesar Rp78.445.027,00 tersebut telah disetorkan ke kas negara pada bulan Januari tahun 2020.

C.5.EKUITAS

*Ekuitas
Rp.44.904.967.550*

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp44.904.967.550,00 dan Rp40.030.783.559,00.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

*Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
Rp158.324.460*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp158.324.460,00. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dengan rincian di bawah ini:

Tabel 27
Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik/Turun	Naik/Turun
				%
Pendapatan PNBP Lainnya				
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		22.680	(22.680)	(100,00%)
- Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	158.324.460		158.324.460	
Jumlah	158.324.460	22.680	158.301.780	697979,63%

Tabel 28
Rincian Pendapatan Denda

Keterangan PNBP	Nilai
Denda pekerjaan pengadaan unit computer/pc	Rp 1.178.100
Denda pekerjaan jasa peliputan dan penayangan media online nasional KEIN	Rp 113.025
Denda pekerjaan jasa peliputan dan penayangan media online nasional FGD ekonomi pancasila pembangunan koperasi dan wilayah pedesaan	Rp 124.575
Denda keterlambatan jasa pengembangan aplikasi OSS	Rp 104.981.305
Denda pekerjaan jasa konsultasi Tenaga Ahli Senior Finansial KPPIP	Rp 280.000
Denda pekerjaan jasa konsultasi Tenaga Ahli Legal KPPIP	Rp 48.000
Denda pekerjaan jasa konsultasi Tenaga Ahli Senior Transportasi KPPIP	Rp 128.000
Denda pekerjaan jasa konsultasi Tenaga Ahli Senior SDA KPPIP	Rp 187.200
Denda pekerjaan belanja sewa	Rp 51.284.255
Total	Rp 158.324.460

D.2. BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai
Rp104.413.513.56
3

Jumlah Beban Pegawai untuk periode Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebesar Rp104.413.513.563,00 dan Rp90.880.174.121,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tabel 29
Rincian Beban Pegawai

Uraian Jenis Beban	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik (Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	21.565.452.090	16.398.227.957	5.166.924.133	31,51%
Beban Pembulatan Gaji PNS	399.160	219.996	179.164	81,44%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	128.137.678	117.619.124	10.758.554	14,65%
Beban Tunj. Anak PNS	34.123.839	303.740.897	37.489.942	12,34%
Beban Tunj. Struktural PNS	4.853.290.000	4.525.170.000	328.120.000	7,25%
Beban Fungsional PNS	284.510.000	154.100.000	130.410.000	84,63%
Beban Tunj. PPh PNS	243.461.201	210.668.713	32.792.488	15,57%
Beban Tunj. Beras PNS	984.667.140	822.101.460	162.565.680	19,77%
Beban Uang Makan PNS	3.914.686.000	2.833.157.595	1.081.528.405	38,17%
Beban Tunjangan Umum PNS	739.555.000	544.215.000	195.340.000	35,89%
Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	105.000.000	157.500.000	(52.500.000)	-33,33%
Beban Uang Lembur	204.235.000	211.661.988	(7.426.988)	-3,51%
Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan)	69.931.697.229	63.637.005.674	6.294.691.555	9,89%
Pengembalian Beban Pegawai	(35.747.774)	(35.214.283)	(533.491)	1,51%
Jumlah	104.413.513.563	90.880.174.121	13.533.339.442	14,89%

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan
Rp4.831.332.513

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.831.332.513,00 dan Rp4.461.440.338,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk periode Tahun 2019 dan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Beban Persediaan

Uraian Jenis Beban	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik / (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	4.674.384.332	4.363.426.113	310.958.219	7,13%
Beban Persediaan Lainnya	156.948.181	90.713.425	66.234.756	73,02%
Beban Persediaan Bahan Baku		7.300.800		
Jumlah Beban Persediaan	4.831.332.513	4.461.440.338	377.192.975	8,45%

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

*Beban Barang dan
Jasa
Rp491.348.336.815*

Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp491.348.336.815,00 dan Rp209.295.032.725,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian Jenis Beban	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik (Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	6.304.549.328	5.891.831.467	412.717.861	7,00%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	314.614.28	27.709.474	3.751.954	13,54%
Beban Operasional	1586.230.000	1582.800.000	3.430.000	0,22%
Beban Barang Operasional lainnya	1907.039.835	2.205.718.847	(298.679.012)	(13,54%)
Beban Bahan	21.897.897.604	16.357.699.915	5.540.197.689	33,87%
Beban Honor Output Kegiatan	19.226.268.606	24.396.858.000	(5.170.589.394)	(21,19%)
Beban Barang Non Operasional	2.196.830.309	10.113.241.28	1.185.506.181	117,22%
Beban Langganan Listrik	599.984.421	626.598.083	(26.613.662)	(4,25%)
Beban Langganan Telepon	17.125.1703	239.139.317	(67.887.614)	(28,39%)
Beban Langganan Air	17.025.532	23.966.132	(6.940.600)	(28,96%)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.816.531.699	4.355.701.572	(539.169.873)	(12,38%)
Beban Jasa Konsultan	32.885.249.419	55.620.195.977	(22.734.946.558)	(40,88%)
Beban Sewa	45.762.317.606	43.623.269.834	2.139.047.772	4,90%
Beban Jasa Profesi	6.735.596.460	6.678.393.160	57.203.300	0,86%
Beban Jasa Lainnya	348.238.739.200	46.777.079.119	301.461.660.081	644,46%
Beban Aset Ekstrakomtabel	-	8.268.700	8.268.700	100%
Pengembalian Beban Barang & Jasa	(28.636.335)	(13.152.1000)	102.884.665	(78,23%)
Jumlah Beban Barang dan Jasa	491.348.336.815	209.295.032.725	282.069.841.490	134,77%

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

*Beban
Pemeliharaan
Rp13.644.270.039*

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp13.644.270.039,00 dan Rp11.781.384.017,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian Jenis Beban	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik (Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.245.527.729	8.078.062.076	2.167.465.653	26,83%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.974.529.586	3.213.114.883	(238.585.297)	(7,43%)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	424.212.724	490.207.148	(65.994.424)	(13,46%)
Jumlah	13.644.270.039	11.781.384.107	1.862.885.932	15,81%

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas
Rp111.766.324.555

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp111.766.324.555,00 dan Rp112.737.616.179,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian Jenis Beban	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik (Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	22.666.319.934	21.453.557.004	1.212.762.930	5,65%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.017.473.000	1.398.830.000	(381.357.000)	(27,26%)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27.933.024.132	26.871.349.951	1.061.674.181	3,95%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	44.659.346.748	41.338.698.883	3.320.647.865	8,03%
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	1.071.889.348	386.380.932	685.508.416	177,42%
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	15.007.774.075	21.503.674.152	(6.495.900.077)	(30,21%)
<i>Pengembalian Beban Perjalanan Dinas</i>	<i>(589.502.682)</i>	<i>(214.874.743)</i>	<i>(374.627.939)</i>	<i>174,35%</i>
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	111.766.324.555	112.737.616.179	(971.291.624)	(0,86%)

D.7. BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Rp4.485.159.717

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.485.159.717,00 dan Rp0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi atas penyerahan konstruksi *pilot project* yang berasal dari Hibah Jutpi *Phase II* yang diserahkan kepada 7 (tujuh) pemerintah daerah yang terdiri dari DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor. Rincian penyerahan untuk masing-masing pemda adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Penyerahan Barang kepada Pemerintah Daerah

No	Pemerintah Daerah	Keterangan	Nilai Penyerahan
1	DKI Jakarta	9 Wayfinding Boards	Rp156.837.314
2	Kota Bogor	Jalur Pejalan Kaki	Rp1.089.395.070
3	Kabupaten Bogor	1 Halte Bus	Rp317.962.380
4	Kota Depok	2 Halte Bus	Rp782.675.536
5	Kota Tangerang	Jalur Pejalan Kaki	Rp1.115.348.806
6	Kota Tangerang Selatan	1 Halte Bus	Rp399.751.759
7	Kota Bekasi	1 Halte Bus	Rp623.188.852
Total			Rp4.485.159.717

D.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp11.088.933.831*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.088.933.831,00 dan Rp9.234.914.089,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian Jenis Beban	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik (Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.610.938.028	5.932.603.158	678.334.870	11,43%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	711.835.038	467.127.240	244.707.798	52,39%
Beban Amortisasi Software	3.501.496.624	2.493.353.473	1.008.143.151	40,43%
Beban Amortisasi Lisensi	225.318.750	225.318.750	-	0,00%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan	30.699.126	92.076.625	(61.377.499)	(66,66%)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	8.646.265	24.434.843	(15.788.578)	(64,62%)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	11.088.933.831	9.234.914.089	1.854.019.742	20,08%

D.9. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

*Beban Penyisihan
Piutang Tak*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban

Tertagih
(Rp227.872)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar (Rp227.872,00) dan (Rp2.553.696,00). Saldo atas Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih terjadi atas penyesuaian atas saldo pada akun penyisihan piutang tak tertagih periode berjalan dengan periode sebelumnya. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Uraian Jenis Belanja	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik (Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang PNBP	-	(3.032.323)	3.032.323	(100,00%)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(227.872)	478.627	(706.499)	
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(227.872)	(2.553.696)	2.325.824	(91,08%)

D.10. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional
Rp59.086.705

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2019 sebesar Rp59.086.713,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Beban Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Uraian Jenis Beban	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik (Turun)	%
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional				
- Surplus (Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar	(17.640.210)	16.265.555	(33.905.765)	(208,45%)
# Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	11.505.555	16.265.555	(4.760.000)	(29,26%)
# Beban Pelepasan Aset Non Lancar	29.145.765		29.145.765	
- Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	76.726.915	74.125.997	(664.531.082)	(89,65%)
# Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	208.407.613	907.366.985	(698.959.372)	(77,03%)
a. Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL	9.750.000	5.500.019	4.249.981	77,27%
b. Penerimaan kembali Belanja Barang TAYL	10.962.723	781.008.950	(770.046.227)	(98,60%)
c. Penerimaan Kembali Modal TAYL	-	-	-	
d. Pendapat Penyesuaian Nilai Persediaan	186.170.640	111.009.816	75.160.824	67,71%
e. Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiun PNS	1524.250	9.848.200	(8.323.950)	(84,52%)
# Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	131.680.698	166.108.988	(34.428.290)	(20,73%)
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	59.086.705	757.523.552	(698.436.847)	(92,20%)

Surplus dari pelepasan Aset Non Lancar diperoleh dari Pendapatan Pemindahtanganan BMN lainnya berupa hasil lelang atas barang milik negara yang telah dihentikan dari operasional pemerintahan sebesar Rp11.505.555,00.

Sedangkan untuk Beban Pelepasan Aset non Lancar merupakan kerugian atas hasil usulan penjualan BMN sebesar Rp29.145.765,00. Adapun surplus (defisit) dari kegiatan Non Operasional Lainnya diperoleh dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu, pendapatan perolehan Aset Lainnya dan pendapatan/beban dari penyesuaian nilai persediaan. Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu merupakan setoran atas belanja Tahun 2018 yaitu atas Belanja Pegawai sebesar Rp9.750.000,00, Belanja Barang Rp10.962.723,00, yang disetorkan pada tahun 2019. Pendapatan penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp186.170.640,00 dan setoran sisa utang non TP/TGR sebesar Rp1.524.250,00, sedangkan Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya Rp131.680.698,00 yang berasal dari beban penyesuaian nilai persediaan Rp130.765.698,00 yang timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode perolehan harga terakhir dan kerugian persediaan rusak/usang sebesar Rp915.000,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

E.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp40.030.783.559

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp40.030.783.559,00 dan Rp40.648.385.483,00.

E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Surplus (Defisit) LO
Rp(741.360.231.996)

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah defisit sebesar Rp(741.360.231.996,00) dan (Rp437.630.461.631,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi Rp0

Tidak terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi pada 31 Desember 2019 dan tahun 2018.

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH EKUITAS

E.4.1. SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih revaluasi aset
tetap Rp10.155.373.653

Selisih revaluasi aset tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian kembali Aset Tetap yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019. Selisih revaluasi aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10.155.373.653,00 dan Rp0. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian kembali atas Gedung dan Bangunan.

E.4.2. KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
(Rp1.903.194.155)

Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah bersaldo (Rp1.903.194.155,00). Adapun pada 31 Desember 2018 bersaldo Rp0. Koreksi Tahun 2019 berasal dari adanya transaksi normalisasi BMN yang mempunyai saldo minus, penyusutan tahun anggaran yang lalu atas hibah masuk berupa peralatan mesin dan software

dari proyek JUTPI *Phase II*, serta penyusutan atas koreksi nilai revaluasi gedung dan bangunan.

E.4.3. KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi lain-lain Rp0

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 bersaldo nihil dan 31 Desember 2018 bersaldo (Rp17.371.200,00).

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar

Entitas

Rp737.982.236.489

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp737.982.236.489,00 dan Rp437.030.230.907,00. Terdapat pengesahan hibah langsung berupa jasa atas kegiatan Prospera yang diterima oleh Kemenko Bidang Perekonomian sebesar Rp76.836.389.526,00, hibah langsung dari JICA hasil program JUTPI *Phase II* sebesar Rp88.399.663.242,00 dan hibah langsung dari JICA hasil program KPPIP Support Facility sebesar Rp149.321.816.820,00. Transfer Keluar merupakan transfer aset berupa software OSS berdasarkan nilai buku aset sebesar Rp3.303.483.412,00 dari Kemenko Perekonomian kepada BKPM. Rincian Transaksi antar Entitas s.d. 31 Desember 2019 terdiri dari:

Tabel 38
Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Jenis Beban	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(973.148.509)
Ditagihkan ke Entitas Lain	427.700.998.822
Pengesahan Hibah Langsung	314.557.869.588
Transfer Keluar	(3.303.483.412)
Jumlah	737.982.236.489

E.6. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir

Rp44.904.967.550

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp44.904.967.550,00 dan Rp40.030.783.559,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. REKENING PEMERINTAH

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan dua rekening untuk menampung uang keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN, yaitu:

- Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) mengelola rekening pada Bank Mandiri Kantor Cabang Departemen Keuangan dengan nomor rekening 1030098879881, yang bersaldo sebesar Rp0 per tanggal 31 Desember 2019.
- Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755) mengelola rekening pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Departemen Keuangan dengan nomor rekening 0507.01.000148.30.7 yang bersaldo sebesar Rp0 per tanggal 31 Desember 2019.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1. LELANG BARANG MILIK NEGARA

Terhadap barang persediaan yang telah usang, telah disampaikan usulan permohonan lelang BMN peralatan dan mesin kepada Kepala KPKNL Jakarta I. Pendapatan atas lelang tersebut kemudian dituangkan dalam salinan risalah lelang Nomor 309/25/2019, dengan nilai lelang barang terjual sebesar Rp5.155.555,00 dan risalah lelang nomor 780/25/2019, dengan nilai lelang barang terjual sebesar Rp6.350.000,00.

F.2.2. REVISI DIPA PAGU ANGGARAN

Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat revisi yang dilakukan atas DIPA Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (BA.035) yaitu pada:

- Satuan Kerja 427752 (Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) melaksanakan Revisi DIPA Nomor DIPA-035.01.1.427752/2018R sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan tanggal revisi terakhir 31 Desember 2019 dengan besaran pagu sebesar Rp415.175.862.000,00.
- Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus telah melakukan 4 (empat) kali revisi DIPA, dengan tanggal revisi terakhir tanggal 31 Desember 2019 dan besaran pagu sebesar Rp18.535.000.000,00.

F.2.3. INFORMASI HIBAH LUAR NEGERI

Pada tahun 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima hibah langsung antara lain:

a. HIBAH PROSPERA

Hibah tersebut berdasarkan pada perjanjian hibah yang tertuang dalam *Subsidiary Arrangement (SA)* antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia tanggal 4 Desember 2017, dengan masa perjanjian oleh kedua belah pihak untuk periode 1 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2023. Hibah dari pemerintah Australia tersebut teregister di Kementerian Keuangan dengan nomor 23TSV7CA dengan total alokasi nilai hibah sebesar AUD 145.000.000 (Pagu Indikatif) yang dilaksanakan oleh 26 (dua puluh enam) Kementerian/Lembaga. Kegiatan hibah yang dibiayai dari pemerintah Australia dilaksanakan melalui proyek Program Kerjasama Indonesia Australia untuk Perekonomian (PROSPERA).

Pagu indikatif PROSPERA yang dibiayai dari hibah pemerintah Australia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebesar AUD 53.594.600. Realisasi pada tahun 2018 sebesar AUD 7.594.382,18 dan telah dilakukan serah terima antara pihak Kemenko Perekonomian dan Pemerintah Australia dengan nomor BAST SP-10/SET.M.EKON.3/05/2019. Berdasarkan BAST tersebut, kemudian dilakukan pengesahan hibah oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal ini KPPN Jakarta II tanggal 20 Juni 2019 dengan nomor persetujuan 2019019427752001.

b. HIBAH JUTPI PHASE II

Hibah tersebut berdasarkan pada perjanjian hibah yang tertuang dalam *Record of Discussion (RoD)* antara Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Pemerintah Indonesia. Hibah dari JICA tersebut teregister di Kementerian Keuangan dengan nomor 2LP711XA dengan total alokasi nilai hibah sebesar JPY 686.837.589. Kegiatan hibah yang dibiayai dari JICA dilaksanakan melalui proyek Program JUTPI PHASE II.

Realisasi pada tahun 2019 adalah sebesar JPY 686.837.589 dan telah dilakukan 3 (tiga) kali serah terima antara pihak Kemenko Perekonomian dan JICA serta telah dilakukan pengesahan hibah oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal ini KPPN Jakarta II dengan rincian sebagai berikut:

Nomor BAST	Nomor Persetujuan	Tanggal Persetujuan
BAST-15/SET.M.EKON.3/10/2019	2019019427752002	28 Oktober 2019
BAST-22/SET.M.EKON.3/11/2019	2019019427752004	31 Desember 2019
BAST-22/SET.M.EKON.3/11/2019	2019019427752005	31 Desember 2019

c. Hibah KPPIP *Support Facility*

Hibah tersebut berdasarkan pada perjanjian hibah yang tertuang dalam *Record of Discussion* (RoD) antara Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Pemerintah Indonesia. Hibah dari JICA tersebut teregister di Kementerian Keuangan dengan nomor 2VLDBKSA dengan total alokasi nilai hibah sebesar JPY 1.207.815.000. Kegiatan hibah yang dibiayai dari JICA dilaksanakan melalui proyek Program KPPIP *Support Facility*.

Realisasi pada tahun 2019 adalah sebesar JPY 1.166.759.000 dan telah dilakukan serah terima antara pihak Kemenko Perekonomian dan JICA dengan nomor BAST-25/SET.M.EKON.3/12/2019. Berdasarkan BAST tersebut, kemudian dilakukan pengesahan hibah oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal ini KPPN Jakarta II tanggal 31 Juni 2019 dengan nomor persetujuan 2019019427752003.

F.2.4. PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PENGELOLAAN SISTEM OSS

Berdasarkan surat Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST-10/SET.M.EKON.3/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019 telah dilakukan proses serah terima sistem OSS antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan BKPM.

LAMPIRAN PENDUKUNG

**Lampiran III. Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2019**

No.	Satker	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/ Kantor Pos	Kode Rekening	Surat Izin		Saldo	Ket
						Nomor	Tanggal		
1	427752	1030098879881	BPG 019 Menko Perekonomian	Bank Mandiri KCP. Depkeu	20	2359/WPb.12/ KP.0204/2019	02 Mei 2019	Rp0	
2	427755	0507-01-000148-30-7	BPG 019 BA 69 Menko Perekonomian	Bank Rakyat Indonesia KCP. Depkeu	20	1104/WPb.12/ KP.0230/2015	23 Maret 2015	Rp0	

Lampiran IV Laporan Pendukung

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Gedung Ali Wardhana
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta Pusat
Kode Pos 10710
Telp : (021) 3522003
Fax : (021) 3511467
Web : www.ekon.go.id



LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 11/08/20 7:50 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_kl_komparatif --

NO	URAIAN	2019				2018			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	973,148,509	(973,148,509)	0	0	1,935,534,996	(1,935,534,996)	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	973,148,509	(973,148,509)	0	0	1,935,534,996	(1,935,534,996)	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	105,020,531,000	104,020,300,613	1,000,230,387	99	92,775,569,000	90,734,621,345	2,040,947,655	98
	BELANJA BARANG	318,925,863,000	314,636,547,474	4,289,315,526	99	349,962,722,000	339,235,959,903	10,726,762,097	97
	BELANJA MODAL	9,764,468,000	9,044,150,735	720,317,265	93	10,786,865,000	8,938,464,425	1,848,400,575	83
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	433,710,862,000	427,700,998,822	6,009,863,178	99	453,525,156,000	438,909,045,673	14,616,110,327	97
C	PEMBIAYAAN				0				0

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 11/08/2020 8:41 AM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	149,980,723	0	149,980,723	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	93,422,527	756,122,835	(662,700,308)	(87.64)
Piutang Bukan Pajak	138,642,677	184,217,101	(45,574,424)	(24.74)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(693,212)	(921,084)	227,872	(24.74)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	137,949,465	183,296,017	(45,346,552)	(24.74)
Persediaan	439,174,124	781,297,894	(342,123,770)	(43.79)
JUMLAH ASET LANCAR	820,526,839	1,720,716,746	(900,189,907)	(52.31)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	73,866,781,172	64,652,995,149	9,213,786,023	14.25
Gedung dan Bangunan	29,541,154,075	22,785,169,780	6,755,984,295	29.65
Aset Tetap Lainnya	464,570,712	63,071,925	401,498,787	636.57
AKUMULASI PENYUSUTAN	(59,618,390,434)	(53,272,966,691)	(6,345,423,743)	11.91
JUMLAH ASET TETAP	44,254,115,525	34,228,270,163	10,025,845,362	29.29
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	15,106,143,042	14,473,017,969	633,125,073	4.37
Aset Lain-lain	513,326,510	3,380,215,129	(2,866,888,619)	(84.81)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(10,954,468,808)	(9,445,623,341)	(1,508,845,467)	15.97
JUMLAH ASET LAINNYA	4,665,000,744	8,407,609,757	(3,742,609,013)	(44.51)
JUMLAH ASET	49,739,643,108	44,356,596,666	5,383,046,442	12.14
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	4,606,249,808	4,232,554,692	373,695,116	8.83
Uang Muka dari KPPN	149,980,723	0	149,980,723	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	78,445,027	93,258,415	(14,813,388)	(15.88)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4,834,675,558	4,325,813,107	508,862,451	11.76
JUMLAH KEWAJIBAN	4,834,675,558	4,325,813,107	508,862,451	11.76
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	44,904,967,550	40,030,783,559	4,874,183,991	12.18
JUMLAH EKUITAS	44,904,967,550	40,030,783,559	4,874,183,991	12.18
JUMLAH EKUITAS	44,904,967,550	40,030,783,559	4,874,183,991	12.18
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	49,739,643,108	44,356,596,666	5,383,046,442	12.14

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 11/08/2020 8:41 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	6,009,863,178	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	973,148,509	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	21,767,753,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	449,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,324,925,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	351,739,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	4,929,755,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	306,174,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	306,388,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	1,007,450,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	4,175,014,000
2.0	511147	Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	0	5,000,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	777,870,000
2.0	511512	Allotment Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	0	192,500,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	385,901,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	69,489,613,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	6,314,193,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	39,000,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	1,594,930,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	1,914,083,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	22,263,450,000
2.0	521212	Allotment Belanja Barang Transito	0	0
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	19,360,035,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	2,200,670,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	4,725,977,000
2.0	521813	Allotment Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai	0	0
2.0	521832	Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	168,000,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	637,881,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	205,200,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	21,600,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	3,892,298,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	33,333,522,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	45,859,802,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	6,929,691,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	42,149,801,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	10,259,036,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	3,009,427,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	23,147,912,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1,050,260,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	0	28,238,311,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	45,146,155,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	1,092,600,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 11/08/2020 8:41 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	524219	Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	15,372,029,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	7,772,842,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	1,991,626,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	11,505,555
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	158,324,460
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	9,750,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	792,044,244
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	1,524,250
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	21,616,180,090	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	1,061,781
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	399,160	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	17,753
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,281,377,678	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	341,230,839	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,853,290,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	9,860,000
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	284,510,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	243,461,201	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	984,667,140	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	3,914,686,000	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	20,905,000
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	739,555,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	185,000
3.0	511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	105,000,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	204,235,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	69,487,456,279	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	3,718,240
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6,304,549,328	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31,461,428	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,586,230,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,907,039,835	0
3.0	521211	Belanja Bahan	21,897,897,604	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	19,239,326,106	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	24,416,000
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,196,830,309	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,699,283,642	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	159,647,883	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	616,890,422	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	178,005,241	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	17,025,532	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,816,493,477	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	32,926,892,380	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 11/08/2020 8:41 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522141	Belanja Sewa	45,758,214,123	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	6,735,596,460	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	665,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	41,605,498,169	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	3,555,335
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,245,527,729	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,974,529,586	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	22,666,889,934	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	142,958,866
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,017,473,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27,934,374,132	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	25,909,906
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	44,659,346,748	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	333,008,695
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1,071,889,348	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	15,007,774,075	0
3.1	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	87,625,215
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,134,500,735	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	1,909,650,000	0
JUMLAH			435,337,897,300	435,337,897,300

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 11/08/2020 8:41 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	417,810	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	149,562,913	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	93,422,527	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	138,642,677	0
0.0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	693,212
0.0	117111	Barang Konsumsi	353,962,160	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	70,584,190	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	14,627,774	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	73,866,781,172	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	29,541,154,075	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	464,570,712	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	57,838,802,839
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,779,587,595
0.0	162151	Software	12,852,955,542	0
0.0	162161	Lisensi	2,253,187,500	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	155,163,260	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	358,163,250	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	155,163,260
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	9,657,357,485
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	799,134,375
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	342,813,688
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	4,565,767,221
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	40,482,587
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	149,980,723
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	78,445,027
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	427,700,998,822
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	973,148,509	0
0.0	313211	Transfer Keluar	3,303,483,412	0
0.0	391111	Ekuitas	0	40,030,783,559
0.0	391114	Revaluasi Aset Tetap	0	10,155,373,653
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	381,967,947	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	1,521,226,208	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	314,557,869,588
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	11,505,555
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	158,324,460

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 11/08/2020 8:41 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	9,750,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	10,962,723
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	1,524,250
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	186,170,640
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	21,565,152,090	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	1,061,781
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	399,160	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	17,753
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,281,377,678	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	341,230,839	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	4,853,290,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	9,860,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	284,510,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	243,461,201	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	984,667,140	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	3,914,686,000	0
3.1	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	20,905,000
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	739,555,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	185,000
3.0	511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	105,000,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	204,235,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	69,931,697,229	0
3.1	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	3,718,240
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	6,304,549,328	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31,461,428	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,586,230,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,907,039,835	0
3.0	521211	Beban Bahan	21,897,897,604	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	19,226,268,606	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	24,416,000
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,196,830,309	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	599,984,421	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	171,251,703	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	17,025,532	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,816,531,699	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	32,885,249,419	0
3.0	522141	Beban Sewa	45,762,317,606	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	6,735,596,460	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	665,000
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	348,238,739,200	0
3.1	522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	0	3,555,335
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,245,527,729	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 11/08/2020 8:41 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,974,529,586	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	22,666,319,934	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	142,958,866
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,017,473,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27,933,024,132	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	25,909,906
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	44,659,346,748	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	333,008,695
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1,071,889,348	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	15,007,774,075	0
3.1	524219	Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	87,625,215
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6,610,938,028	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	711,835,038	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	3,501,496,624	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	225,318,750	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	30,699,126	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	8,646,265	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	4,674,384,332	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	424,212,724	0
3.0	593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau	4,485,159,717	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	156,948,181	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	130,765,698	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	227,872
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	29,145,765	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	915,000	0
JUMLAH			868,885,605,925	868,885,605,925

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 11/08/20 8:42 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_kl --

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	40,030,783,559	40,648,385,483	(617,601,924)	(1.519)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(741,360,231,996)	(437,630,461,631)	(303,729,770,365)	69.403
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	8,252,179,498	(17,371,200)	8,269,550,698	(47,604.948)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	
SELISIH REVALUASI ASET	10,155,373,653	0	10,155,373,653	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(1,903,194,155)	0	(1,903,194,155)	()
LAIN-LAIN	0	(17,371,200)	17,371,200	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	737,982,236,489	437,030,230,907	300,952,005,582	68.863
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	4,874,183,991	(617,601,924)	5,491,785,915	(889.211)
EKUITAS AKHIR	44,904,967,550	40,030,783,559	4,874,183,991	12.176

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 11/08/20 7:51 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	158,324,460	22,680	158,301,780	697,979.63
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	158,324,460	22,680	158,301,780	697,979.63
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	158,324,460	22,680	158,301,780	697,979.63
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	104,413,513,563	90,880,174,121	13,533,339,442	14.891
Beban Persediaan	4,831,332,513	4,461,440,338	369,892,175	8.291
Beban Barang dan Jasa	491,348,336,815	209,295,032,725	282,053,304,090	134.763
Beban Pemeliharaan	13,644,270,039	11,781,384,107	1,862,885,932	15.812
Beban Perjalanan Dinas	111,766,324,555	112,737,616,179	(971,291,624)	(0.862)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	4,485,159,717	0	4,485,159,717	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 11/08/20 7:51 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	11,088,933,831	9,234,914,089	1,854,019,742	20.076
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(227,872)	(2,553,696)	2,325,824	(91.077)
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	741,577,643,161	438,388,007,863	303,189,635,298	69.16
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(741,419,318,701)	(438,387,985,183)	(303,031,333,518)	69.124
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(17,640,210)	16,265,555	(33,905,765)	(208.451)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	11,505,555	16,265,555	(4,760,000)	(29.264)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	29,145,765	0	29,145,765	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	76,726,915	741,257,997	(664,531,082)	(89.649)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	208,407,613	907,366,985	(698,959,372)	(77.032)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	131,680,698	166,108,988	(34,428,290)	(20.726)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	59,086,705	757,523,552	(698,436,847)	(92.2)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(741,360,231,996)	(437,630,461,631)	(303,729,770,365)	69.403
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(741,360,231,996)	(437,630,461,631)	(303,729,770,365)	69.403

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 11/08/20 8:42 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian							
2486	Peningkatan Pelayanan Perencanaan	12,491,361,000	11,949,126,000	11,882,793,972	2,190,000	11,880,603,972	99.43	68,522,028
2487	Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas	4,000,000,000	4,000,000,000	3,976,919,634	10,782,400	3,966,137,234	99.15	33,862,766
2488	Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)	136,281,777,000	167,901,671,000	166,681,905,720	42,166,046	166,639,739,674	99.25	1,261,931,326
2489	Pengawasan Inspektorat	800,000,000	1,000,000,000	988,061,463	6,121,800	981,939,663	98.19	18,060,337
2490	Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian	2,500,000,000	2,066,240,000	2,041,216,647	5,030,488	2,036,186,159	98.55	30,053,841
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	156,073,138,000	186,917,037,000	185,570,897,436	66,290,734	185,504,606,702	99.28	1,412,430,298
06	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian							
2491	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital	12,000,000,000	8,777,928,000	7,986,543,242	0	7,986,543,242	90.98	791,384,758
2492	Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran	2,500,000,000	2,500,000,000	2,488,981,684	0	2,488,981,684	99.56	11,018,316
2493	Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi	8,000,000,000	8,000,000,000	7,943,860,987	58,035,406	7,885,825,581	98.57	114,174,419
2494	Koordinasi Kebijakan Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Daya Saing Nasional	5,000,000,000	5,000,000,000	4,978,045,992	42,127,028	4,935,918,964	98.72	64,081,036
2498	Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN	1,500,000,000	1,500,000,000	1,491,371,422	0	1,491,371,422	99.42	8,628,578
2499	Koordinasi Kebijakan Bidang Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha	1,700,000,000	1,700,000,000	1,611,831,322	2,880,900	1,608,950,422	94.64	91,049,578
2500	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional	2,350,000,000	2,350,000,000	2,296,155,371	255,000	2,295,900,371	97.7	54,099,629
2501	Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil	1,500,000,000	1,500,000,000	1,497,620,312	0	1,497,620,312	99.84	2,379,688
2502	koordinasi Kebijakan Bidang Industri Ekstraktif	6,500,000,000	6,500,000,000	6,470,975,314	0	6,470,975,314	99.55	29,024,686
2503	Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal	1,800,000,000	1,800,000,000	1,792,374,026	0	1,792,374,026	99.58	7,625,974
2504	Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Energi	1,500,000,000	1,500,000,000	1,498,808,343	0	1,498,808,343	99.92	1,191,657

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 11/08/20 8:42 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2505	Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM	1,500,000,000	1,500,000,000	1,499,576,743	0	1,499,576,743	99.97	423,257
2506	Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air	2,800,000,000	2,800,000,000	2,776,916,115	0	2,776,916,115	99.18	23,083,885
2507	Koordinasi Kebijakan Sistem Transportasi Multi Moda	1,500,000,000	1,500,000,000	1,467,466,718	0	1,467,466,718	97.83	32,533,282
2508	Koordinasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Kehutanan	2,500,000,000	2,500,000,000	2,498,091,293	0	2,498,091,293	99.92	1,908,707
2509	Koordinasi Kebijakan Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup	1,500,000,000	1,500,000,000	1,498,865,888	0	1,498,865,888	99.92	1,134,112
2510	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik	1,900,000,000	1,660,000,000	1,653,698,071	0	1,653,698,071	99.62	6,301,929
2511	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia	2,200,000,000	3,160,000,000	3,154,357,743	21,253,856	3,133,103,887	99.15	26,896,113
2512	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah	1,900,000,000	1,660,000,000	1,655,550,542	0	1,655,550,542	99.73	4,449,458
2513	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan	1,900,000,000	1,660,000,000	1,655,032,978	0	1,655,032,978	99.7	4,967,022
2514	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional	1,900,000,000	1,660,000,000	1,659,142,210	0	1,659,142,210	99.95	857,790
2515	Koordinasi Kebijakan Produktifitas Energi	1,800,000,000	1,800,000,000	1,799,347,526	0	1,799,347,526	99.96	652,474
2516	Koordinasi Kebijakan Pangan	4,200,000,000	4,362,400,000	4,337,205,932	0	4,337,205,932	99.42	25,194,068
2518	Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	7,500,000,000	7,500,000,000	7,464,116,043	0	7,464,116,043	99.52	35,883,957
2519	Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri	2,350,000,000	2,350,000,000	2,066,783,000	653,000	2,066,130,000	87.92	283,870,000
2520	Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi	1,500,000,000	1,500,000,000	1,476,823,958	0	1,476,823,958	98.45	23,176,042
2521	Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor dan Fasilitas Perdagangan Internasional	2,350,000,000	2,350,000,000	2,292,869,963	3,825,000	2,289,044,963	97.41	60,955,037
2522	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi	7,050,000,000	7,050,000,000	6,901,119,165	4,571,700	6,896,547,465	97.82	153,452,535
2524	Koordinasi Kebijakan Peternakan dan Perikanan	1,700,000,000	1,700,000,000	1,699,329,131	0	1,699,329,131	99.96	670,869
2525	Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura	5,900,000,000	5,737,600,000	5,735,278,022	0	5,735,278,022	99.96	2,321,978
2526	Koordinasi Kebijakan Bidang Agribisnis	1,500,000,000	1,500,000,000	1,488,238,220	0	1,488,238,220	99.22	11,761,780

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 11/08/20 8:42 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2527	Koordinasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur	1,500,000,000	1,500,000,000	1,486,466,824	0	1,486,466,824	99.1	13,533,176
2528	Koordinasi Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian	1,500,000,000	1,500,000,000	1,497,056,688	0	1,497,056,688	99.8	2,943,312
2529	Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas	1,500,000,000	1,500,000,000	1,493,929,970	0	1,493,929,970	99.6	6,070,030
5032	Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi	77,495,265,000	67,755,897,000	67,145,987,885	392,830,921	66,753,156,964	98.52	1,002,740,036
5047	Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus	18,000,000,000	18,535,000,000	18,486,101,360	1,900,000	18,484,201,360	99.73	50,798,640
5200	Koordinasi Percepatan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)	15,000,000,000	15,650,000,000	15,456,167,491	16,615,513	15,439,551,978	98.66	210,448,022
5226	Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1,800,000,000	1,800,000,000	1,716,144,125	6,357,200	1,709,786,925	94.99	90,213,075
5227	Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan	1,500,000,000	1,500,000,000	1,482,677,429	27,200,533	1,455,476,896	97.03	44,523,104
5228	Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan	2,500,000,000	2,500,000,000	2,480,501,816	1,200,000	2,479,301,816	99.17	20,698,184
5229	Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan	3,500,000,000	4,625,000,000	4,559,140,558	0	4,559,140,558	98.58	65,859,442
5266	Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	34,000,000,000	33,350,000,000	32,143,436,755	7,890,000	32,135,546,755	96.36	1,214,453,245
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	258,095,265,000	246,793,825,000	242,783,988,177	587,596,057	242,196,392,120	98.375	4,597,432,880
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	414,168,403,000	433,710,862,000	428,354,885,613	653,886,791	427,700,998,822	98.765	6,009,863,178
	JUMLAH	414,168,403,000	433,710,862,000	428,354,885,613	653,886,791	427,700,998,822	98.77	6,009,863,178

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 11/08/20 7:51 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	20,020,381,000	21,767,753,000	21,616,180,090	1,061,781	21,615,118,309	99.3	152,634,691
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	642,000	449,000	399,160	17,753	381,407	88.9	67,593
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,124,925,000	1,324,925,000	1,281,377,678	0	1,281,377,678	96.71	43,547,322
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	301,739,000	351,739,000	341,230,839	0	341,230,839	97.01	10,508,161
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,913,390,000	4,929,755,000	4,853,290,000	9,860,000	4,843,430,000	98.45	86,325,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	42,000,000	306,174,000	284,510,000	0	284,510,000	92.92	21,664,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	445,739,000	306,388,000	243,461,201	0	243,461,201	79.46	62,926,799
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,007,450,000	1,007,450,000	984,667,140	0	984,667,140	97.74	22,782,860
511129	Belanja Uang Makan PNS	3,692,592,000	4,175,014,000	3,914,686,000	20,905,000	3,893,781,000	93.76	281,233,000
511147	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar	240,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,408,693,000	777,870,000	739,555,000	185,000	739,370,000	95.07	38,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	33,197,551,000	34,952,517,000	34,259,357,108	32,029,534	34,227,327,574	98.02	725,189,426
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	170,625,000	192,500,000	105,000,000	0	105,000,000	54.55	87,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	170,625,000	192,500,000	105,000,000	0	105,000,000	54.55	87,500,000
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	360,000,000	385,901,000	204,235,000	0	204,235,000	52.92	181,666,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	360,000,000	385,901,000	204,235,000	0	204,235,000	52.92	181,666,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	49,686,900,000	69,489,613,000	69,487,456,279	3,718,240	69,483,738,039	100	5,874,961
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	49,686,900,000	69,489,613,000	69,487,456,279	3,718,240	69,483,738,039	100	5,874,961
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	83,415,076,000	105,020,531,000	104,056,048,387	35,747,774	104,020,300,613	99.08	1,000,230,387
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6,017,596,000	6,314,193,000	6,304,549,328	0	6,304,549,328	99.85	9,643,672
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	42,000,000	39,000,000	31,461,428	0	31,461,428	80.67	7,538,572
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,532,910,000	1,594,930,000	1,586,230,000	0	1,586,230,000	99.45	8,700,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,933,565,000	1,914,083,000	1,907,039,835	0	1,907,039,835	99.63	7,043,165
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	9,526,071,000	9,862,206,000	9,829,280,591	0	9,829,280,591	99.67	32,925,409
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	12,747,966,000	22,263,450,000	21,897,897,604	0	21,897,897,604	98.36	365,552,396
521212	Belanja Barang Transito	7,166,430,000	0	0	0	0		0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 11/08/20 7:51 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	27,181,402,000	19,360,035,000	19,239,326,106	24,416,000	19,214,910,106	99.38	145,124,894
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,566,427,000	2,200,670,000	2,196,830,309	0	2,196,830,309	99.83	3,839,691
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	48,662,225,000	43,824,155,000	43,334,054,019	24,416,000	43,309,638,019	98.88	514,516,981
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,637,513,000	4,725,977,000	4,699,283,642	0	4,699,283,642	99.44	26,693,358
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	6,000,000	0	0	0	0		0
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	80,000,000	168,000,000	159,647,883	0	159,647,883	95.03	8,352,117
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	4,723,513,000	4,893,977,000	4,858,931,525	0	4,858,931,525	99.28	35,045,475
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,206,000,000	637,881,000	616,890,422	0	616,890,422	96.71	20,990,578
522112	Belanja Langganan Telepon	451,800,000	205,200,000	178,005,241	0	178,005,241	86.75	27,194,759
522113	Belanja Langganan Air	195,600,000	21,600,000	17,025,532	0	17,025,532	78.82	4,574,468
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	9,724,326,000	3,892,298,000	3,816,493,477	0	3,816,493,477	98.05	75,804,523
522131	Belanja Jasa Konsultan	70,268,965,000	33,333,522,000	32,926,892,380	0	32,926,892,380	98.78	406,629,620
522141	Belanja Sewa	43,486,368,000	45,859,802,000	45,758,214,123	0	45,758,214,123	99.78	101,587,877
522151	Belanja Jasa Profesi	8,842,472,000	6,929,691,000	6,735,596,460	665,000	6,734,931,460	97.2	194,759,540
522191	Belanja Jasa Lainnya	33,910,698,000	42,149,801,000	41,605,498,169	3,555,335	41,601,942,834	98.71	547,858,166
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	168,086,229,000	133,029,795,000	131,654,615,804	4,220,335	131,650,395,469	98.97	1,379,399,531
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,175,925,000	10,259,036,000	10,245,527,729	0	10,245,527,729	99.87	13,508,271
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,751,401,000	3,009,427,000	2,974,529,586	0	2,974,529,586	98.84	34,897,414
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	3,927,326,000	13,268,463,000	13,220,057,315	0	13,220,057,315	99.64	48,405,685
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	20,977,250,000	23,147,912,000	22,666,889,934	142,958,866	22,523,931,068	97.92	623,980,932
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,624,750,000	1,050,260,000	1,017,473,000	0	1,017,473,000	96.88	32,787,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25,023,893,000	28,238,311,000	27,934,374,132	25,909,906	27,908,464,226	98.92	329,846,774
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	25,824,784,000	45,146,155,000	44,659,346,748	333,008,695	44,326,338,053	98.92	819,816,947
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	73,450,677,000	97,582,638,000	96,278,083,814	501,877,467	95,776,206,347	98.66	1,806,431,653
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	750,000,000	1,092,600,000	1,071,889,348	0	1,071,889,348	98.1	20,710,652
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	16,007,116,000	15,372,029,000	15,007,774,075	87,625,215	14,920,148,860	97.63	451,880,140
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	16,757,116,000	16,464,629,000	16,079,663,423	87,625,215	15,992,038,208	97.66	472,590,792
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	325,133,157,000	318,925,863,000	315,254,686,491	618,139,017	314,636,547,474	98.85	4,289,315,526
53	BELANJA MODAL							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 11/08/20 7:51 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,170,670,000	7,772,842,000	7,134,500,735	0	7,134,500,735	91.79	638,341,265
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	4,170,670,000	7,772,842,000	7,134,500,735	0	7,134,500,735	91.79	638,341,265
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	1,449,500,000	1,991,626,000	1,909,650,000	0	1,909,650,000	95.88	81,976,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	1,449,500,000	1,991,626,000	1,909,650,000	0	1,909,650,000	95.88	81,976,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	5,620,170,000	9,764,468,000	9,044,150,735	0	9,044,150,735	92.62	720,317,265
	JUMLAH BELANJA	414,168,403,000	433,710,862,000	428,354,885,613	653,886,791	427,700,998,822	98.77	6,009,863,178